

bab i pendahuluan

bab ini memulai pemaparan terkait latar belakang masalah ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. pada bab ini juga memaparkan beberapa penelitian yang membahas relevansi topik ini, dan juga menguraikan teori-teori yang menjadi dasar dalam mendukung penelitian ini serta menjadi acuan bagi penulis dalam menyusun hasil penelitian. teori yang dibahas mencakup teori ekonomi politik. selain itu, bab ini juga memaparkan kerangka pemikiran yang digambarkan melalui skema berpikir.

1.1 latar belakang

sumber daya alam selalu menjadi masalah yang sangat sering terjadi sejak dahulu hingga sekarang dan sifatnya mendasar, karena ia tidak sekedar berfungsi sebagai habitat tempat manusia tinggal, namun juga sebagai ruang untuk faktor produksi dan pilar kehidupan sosial yang utama. didalam wilayah mengandung berbagai sumber daya alam, seperti tanah, air, tumbuhan, hewan, oksigen, dan lainnya, yang bukan merupakan hasil buatan manusia melainkan merupakan pemberian dari tuhan. tuhan yang maha esa yang memberikan manfaat untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan hidup manusia di segala bidang sosial dari individu dan kelompok sosial yang menjadi bagian dari masyarakat.

indonesia memiliki wilayah yang luas dan beragam, dengan kepadatan penduduk yang terus meningkat di banyak daerah. bagi masyarakat, tanah memiliki peran sentral tidak hanya sebagai aset ekonomi tetapi juga sebagai bagian dari identitas sosial dan budaya. banyak lahan yang digunakan masyarakat secara turun-temurun untuk bertani, berdagang,

atau sebagai tempat tinggal tanpa memiliki dokumen legal formal. di sisi lain, TNI memerlukan lahan yang memenuhi kriteria strategis untuk kegiatan latihan militer yang terkadang berlokasi di area yang telah dihuni atau dimanfaatkan oleh masyarakat. ketidaksinkronan ini dapat memunculkan konflik terkait penggunaan lahan.

pengelolaan lahan untuk kepentingan latihan oleh TNI (tentara nasional Indonesia) menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius di Indonesia. sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pertahanan negara, TNI membutuhkan area tertentu untuk mendukung berbagai fungsi latihan militer guna meningkatkan kesiapan dan kapabilitas pertahanan. namun, dalam praktiknya, kebutuhan ini sering kali bersinggungan dengan hak masyarakat yang telah lama mengelola atau menempati lahan tersebut untuk kehidupan sehari-hari. hal ini memunculkan tantangan yang perlu dikelola secara bijak agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

konflik adalah unsur terpenting dalam kehidupan manusia. konflik senantiasa terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia baik itu antar individu, antar kelompok atau pun individu dan kelompok. setiap konflik yang terjadi membawa dinamika tersendiri dalam masyarakat baik itu sosial, ekonomi atau pun politik. penelitian ini berfokus pada peran pemerintah dalam penyelesaian konflik, khususnya konflik lahan, di mana persoalan kepemilikan lahan sering kali menjadi pemicu utama. masalah lahan ini sangat kompleks dan memiliki dampak luas bagi suatu daerah dari sisi politik, sosiologi, hingga ekonomi, terutama

karena adanya persaingan berbagai pemangku kepentingan dalam pemanfaatan lahan tersebut.

dampak dari konflik penguasaan lahan untuk kepentingan latihan tni dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. dari sisi ekonomi, masyarakat yang kehilangan akses terhadap lahan berpotensi kehilangan mata pencaharian utama, seperti pertanian, peternakan, atau usaha kecil lainnya. ketergantungan pada lahan sebagai sumber kehidupan membuat banyak keluarga rentan terhadap kemiskinan ketika lahan mereka diambil alih untuk kepentingan lain. dari sisi sosial, ketegangan yang muncul akibat pengalihan fungsi lahan sering kali merusak hubungan harmonis antara masyarakat dengan institusi negara, khususnya tni. selain itu, dari sisi psikologis, ketidakpastian dan tekanan akibat kehilangan tempat tinggal atau sumber pendapatan dapat menimbulkan trauma bagi individu maupun komunitas secara keseluruhan.

dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang inklusif dan berbasis dialog untuk menyelesaikan konflik terkait penguasaan lahan. semua pihak yang berkepentingan, termasuk tni, pemerintah, dan masyarakat, harus dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi penggunaan lahan. proses pengelolaan lahan harus dilakukan secara transparan, dengan memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat mengenai tujuan penguasaan lahan serta manfaat jangka panjangnya bagi negara. selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat yang terdampak diberikan kompensasi yang adil dan memadai,

baik dalam bentuk penggantian lahan, bantuan finansial, maupun program pemulihan ekonomi.

beragam upaya penyelesaian telah dilakukan, termasuk mediasi, arbitrase, serta pendekatan strategis berbasis komunikasi, namun hasilnya sering kali belum efektif atau hanya parsial. seperti halnya penelitian yang saya angkat dimana konflik ini antara tni ad (dodiklatpur rindam xiv/hasanuddin bance'e) dan warga di desa poleonro dalam memperebutkan lahan yang masing-masing pihak mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas tanah tersebut.

pada tahun 2017, kepala desa poleonro yaitu abd. asis,m yang merupakan mantan anggota tni, pada masa pemerintahannya waktu itu, tni meminta izin ke beberapa desa di kecamatan libureng termasuk desa poleonro untuk masuk ke lahan masyarakat melakukan latihan namun dari beberapa desa tersebut menolak permohonan tni, akan tetapi hanya kepala desa poleonro yang memberikan izin kepada tni menggunakan lahan masyarakat untuk sekedar latihan. setelah berlangsung beberapa tahun masa jabatan abd.asis,m berakhir begitupun dengan izin yang telah diberikan di beberapa tahun lalu, yang kemudian tergantikan oleh sultan sebagai desa poleonro tahun 2023 – sekarang, di masa pemerintahan yang baru pihak tni meminta izin kembali untuk perluasan lahan latihan sekitar 32.224 hektar dan masyarakat tidak boleh mengelola lahan, dengan alasan mereka terganggu dengan pagar-pegar dan tanaman yang ada di lahan masyarakat. maka dari itulah kepala desa poleonro dan masyarakat setempat pun menolak karena lahan yang mereka kelola dan tempat tni latihan merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat.

akibat penolakan dari kepala desa dan warga di desa poleonro, kecamatan libureng, kabupaten bone. oknum tni melakukan tindakan seperti penutupan jalan tani, penyerobotan tanaman, dan pengrobohan kandang ternak dan pagar milik warga. penutupan jalan tani menjadi masalah utama karena jalan tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian mereka. jalan yang selama ini digunakan untuk mengangkut hasil panen dan kebutuhan pertanian tiba-tiba ditutup oleh pihak tertentu tanpa ada musyawarah atau persetujuan dari warga setempat. sehingga, masyarakat mengalami kesulitan dalam beraktivitas di lahan mereka, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap produktivitas pertanian. selain masalah jalan tani, warga juga menghadapi tindakan penyerobotan tanaman di lahan mereka. tanaman yang sudah ditanam dan dirawat oleh warga secara sepihak ditebang, dipanen, atau dirusak oleh pihak tni yang mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut. hal ini menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi petani, karena mereka kehilangan hasil panen dan modal yang sudah dikeluarkan untuk bercocok tanam. konflik semakin diperparah dengan tindakan pengrobohan kandang ternak dan pagar milik warga. banyak warga yang kehilangan fasilitas penting untuk memelihara ternak mereka akibat tindakan ini. kandang ternak yang dirobohkan mengakibatkan ternak menjadi tidak terkontrol dan rentan terhadap pencurian atau bahaya lainnya. penghancuran pagar juga menimbulkan permasalahan karena batas lahan menjadi tidak jelas, yang dapat memicu konflik lanjutan terkait batas kepemilikan tanah. selain itu selama latihan tni selalu saja mengakibatkan kerusakan pada tanaman dan tidak ada kompensasi yang layak diberikan pada petani.

konflik pun terjadi pada tanggal 13 oktober 2023 dimana masyarakat desa poleonro resah dan melakukan demonstrasi di dprd bone, kedatangan ratusan masyarakat ke dprd ini ingin menyampaikan aspirasi terkait sengketa lahan antara warga dan pihak tni dodiklatpur rindam xiv/hasanuddin bance'e, dengan harapan dapat di fasilitasi dan di berikan tindaklanjut untuk menyelesaikan masalah tersebut. ketua dprd bone langsung menerima demonstrasi yang dilakukan masyarakat desa poleonro dan menjajikan bahwa pihaknya akan segera menyampaikan ke pihak tni agar kiranya dibicarakan untuk mendapat solusi yang terbaik.

penelitian ini sendiri akan menggunakan teori ekonomi politik . teori ini memandang bahwa sengketa tanah tidak sekadar persoalan teknis mengenai kepemilikan, melainkan berkaitan erat dengan relasi kuasa, akses terhadap sumber daya, serta struktur sosial dan politik yang melingkupinya. dengan teori ini, konflik lahan di desa poleonro dapat dianalisis sebagai pertarungan klaim antara

masyarakat yang memiliki legitimasi historis atas tanah dengan tni yang menggunakan klaim legal-formal dan kekuasaan negara. penegasan teori ini penting agar penelitian mampu memberikan analisis yang lebih mendalam, tidak hanya melihat konflik sebagai perselisihan biasa, tetapi juga sebagai cerminan dari ketimpangan struktur konflik lahan di indonesia.

berdasarkan latar belakang konflik yang telah dipaparkan, penulis tertarik meneliti lebih dalam mengenai konflik lahan antara masyarakat dengan tni. selain itu, peneliti juga mengkaji tentang upaya penyelesaian yang terjadi akibat

adanya konflik serta dampak terjadinya konflik antara masyarakat dengan tni di desa poleonro.

oleh karena itu peneliti penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “konflik lahan pertanian antara masyarakat dan tni ad di desa poleonro kecamatan libureng kabupaten bone”.

1.2 rumusan masalah

berdasarkan latar belakang di atas, konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dan pihak tni ad (dodiklatpur rindam xiv/hasanuddin bance'e) menjadi isu utama. maka rumusan masalah yang akan di angkat pada penelitian ini mengapa konflik lahan pertanian masyarakat dengan tni ad (dodiklatpur rindam xiv/hasanuddin bance'e), sampai saat ini belum berakhir?

1.3 tujuan penelitian

berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan terjadinya konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dan tni ad (dodiklatpur rindam xiv/hasanuddin bance'e) yang sampai saat ini masih belum terlihat penyelesaiannya.

1.4 manfaat penelitian

1. manfaat akademis

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu politik pada khususnya.

2. manfaat praktis

penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan memperluas wawasan tentang

masalah-masalah konflik perebutan lahan yang memberi pengalaman langsung bagi peneliti, sehingga nantinya dapat lebih memahami serta berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan sosial di masyarakat.

tinjauan pustaka

1.5 ekonomi politik

ekonomi politik berangkat dari berbagai premis yang menunjukkan dua aspek utama. pertama, istilah ini awalnya merujuk pada disiplin yang mempelajari ekonomi secara umum. namun, sejak akhir abad ke-19, disiplin baru yang disebut ilmu ekonomi muncul dan mulai berkembang secara terpisah. pergeseran istilah ini mencerminkan perubahan signifikan dalam fokus kajian kedua disiplin tersebut.

ekonomi politik klasik berlandaskan teori yang menempatkan tenaga kerja sebagai sumber utama nilai ekonomi. dalam kritik terhadap sistem ekonomi yang berorientasi pada keuntungan mulai dari pandangan robertson hingga karl marx teori ini mengalami pembalikan, dengan menyatakan bahwa akumulasi keuntungan pada dasarnya berasal dari eksploitasi tenaga kerja.

ekonomi politik merupakan kajian tentang hubungan kekuasaan dan peran institusi dalam masyarakat serta bagaimana keduanya memengaruhi cara individu dan kelompok memenuhi serta menentukan kebutuhan mereka. dengan kata lain, ekonomi politik mempelajari aspek ekonomi dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi dalam perekonomian serta pengaruh relasi kekuasaan sosial. dalam teori ekonomi politik, hubungan kekuasaan ini dapat berlangsung baik antara negara- bangsa maupun antar kelompok dalam suatu masyarakat. karena kepemilikan

merupakan institusi yang menciptakan ketimpangan dalam distribusi kekuasaan sosial, maka pasar dan berbagai institusi lainnya memiliki dimensi politik yang kuat, karena keberadaannya berakar pada ketidakseimbangan dalam kekuasaan sosial.

negara sering kali berperan dalam menentukan distribusi dan penggunaan tanah, baik melalui regulasi hukum maupun intervensi langsung oleh lembaga negara, termasuk militer. dalam banyak kasus, negara menggunakan dalih kepentingan nasional untuk menguasai tanah yang sebelumnya digunakan oleh masyarakat. hal ini mencerminkan bagaimana negara bertindak bukan sekadar sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktor ekonomi yang memiliki kepentingan dalam penguasaan sumber daya. dalam kasus keterlibatan militer, sering kali muncul justifikasi berbasis keamanan nasional atau kepentingan strategis, yang membuat masyarakat kehilangan hak atas lahan mereka.

pendekatan ekonomi politik menurut karl marx, tanah merupakan alat produksi yang menjadi bagian dari sistem kapitalisme di mana kelas penguasa (termasuk negara dan institusi seperti militer) cenderung mempertahankan kontrolnya atas sumber daya, sementara masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya pada tanah sering kali menjadi pihak yang terpinggirkan. negara, sebagai representasi kelas yang berkuasa, cenderung mendukung penguasaan tanah oleh institusi yang memiliki kekuatan lebih besar, yang dalam hal ini adalah tni ad.

dalam konteks ini, teori ekonomi politik agraria yang dikemukakan oleh henry bernstein dalam bukunya *class dynamics of agrarian change* (2010) dapat menjadi rujukan

penting. bernstein menjelaskan bahwa konflik lahan sering kali terjadi karena adanya pertarungan kepentingan antara kelas-kelas sosial yang memiliki akses berbeda terhadap tanah dan sumber daya agraria. negara dan institusi yang berkuasa, termasuk militer, sering kali berperan dalam mempertahankan atau memperkuat ketimpangan akses terhadap tanah dengan menggunakan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu. dalam konflik lahan di desa poleonro, masyarakat yang bergantung pada pertanian kehilangan akses terhadap tanah karena adanya intervensi negara melalui tni ad, yang memiliki kekuatan lebih besar dalam menguasai lahan.

keith griffin, dalam bukunya *the political economy of agrarian change* (1976), menyoroti bagaimana perubahan kebijakan agraria yang dilakukan oleh negara sering kali menyebabkan konflik dengan masyarakat. griffin berpendapat bahwa tanah merupakan faktor produksi yang sangat penting bagi masyarakat agraris, dan ketika negara atau institusi lain berusaha mengubah kepemilikan atau penggunaan lahan tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat lokal, maka konflik menjadi tidak terhindarkan. ia juga menekankan bahwa negara sering menggunakan alasan pembangunan atau keamanan nasional untuk mengamankan kontrol atas tanah, meskipun hal tersebut dapat mengorbankan kesejahteraan masyarakat. selain itu, teori hak kepemilikan dalam ekonomi politik menjelaskan bahwa konflik lahan dapat muncul ketika terjadi ketidakjelasan status hukum tanah. dalam banyak kasus, hak atas tanah masyarakat tidak diakui secara formal oleh negara, atau terjadi perubahan kebijakan yang menyebabkan pergeseran kepemilikan. hak kepemilikan tanah bukan hanya

soal legalitas, tetapi juga berkaitan dengan relasi kekuasaan. masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam akses politik dan hukum sering kali kalah dalam sengketa tanah dengan aktor negara yang memiliki kekuatan lebih besar. ketimpangan ini semakin diperburuk jika negara atau militer menggunakan instrumen hukum dan kekuasaan represif untuk mempertahankan penguasaan lahan.

pandangan ini juga sejalan dengan teori ekonomi politik negara yang dikemukakan oleh robert cox dalam tulisannya *social forces, states and world orders: beyond international relations theory* (1981). cox menjelaskan bahwa negara cenderung mereproduksi kepentingan kelas dominan dan sering kali menggunakan kekuasaan politik serta regulasi hukum untuk mempertahankan kontrol atas sumber daya strategis, termasuk tanah. dalam kasus konflik lahan, hal ini berarti bahwa negara, melalui institusi seperti militer, berupaya mengamankan tanah yang dianggap bernilai strategis atau ekonomis, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan kepentingan masyarakat lokal. teori ekonomi politik memaparkan bagaimana tanah dapat menjadi instrumen akumulasi kapital bagi kelompok tertentu. dalam banyak kasus, penguasaan tanah oleh negara atau militer berkaitan dengan kepentingan ekonomi yang lebih luas, seperti investasi, eksploitasi sumber daya, atau proyek strategis yang dianggap menguntungkan bagi institusi tertentu. perspektif ini sejalan dengan gagasan negara, institusi militer, dapat berfungsi sebagai bagian dari mekanisme kapitalisme negara yang bertujuan untuk mengamankan sumber daya demi kepentingan elite, bukan masyarakat luas.

dari perspektif ekonomi politik global, konflik lahan juga bisa dilihat dalam konteks neoliberal, di mana tanah menjadi komoditas yang dapat dialihkan dari masyarakat kepada aktor yang lebih kuat, termasuk negara dan korporasi. kebijakan privatisasi atau perubahan fungsi lahan yang dilakukan oleh negara sering kali mengabaikan aspek kesejahteraan masyarakat lokal. dalam banyak kasus, masyarakat yang telah lama menggantungkan hidupnya pada tanah tersebut justru kehilangan akses akibat kebijakan yang berpihak pada institusi yang lebih kuat secara politik dan ekonomi.

dengan demikian, konflik lahan antara masyarakat dan tni ad di desa poleonro bukan sekadar permasalahan legal atau administratif, tetapi merupakan persoalan struktural yang mencerminkan ketimpangan dalam ekonomi politik. tanah sebagai sumber daya utama dalam kehidupan masyarakat agraris menjadi arena pertarungan antara kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat lokal. konflik ini tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga mencerminkan pola lebih besar dalam pengelolaan sumber daya oleh negara di berbagai wilayah.

1.6 faktor penyebab konflik

banyak faktor yang dapat menyebabkan timbulnya konflik. salah satu penyebab konflik antarindividu adalah perbedaan posisi, pendapat, dan keyakinan pribadi. dalam konflik semacam ini, terjadi pertentangan pandangan, di mana masing-masing pihak berupaya menghilangkan pengaruh lawannya. hal ini tidak selalu merujuk pada tindakan perusakan fisik, tetapi dapat pula berupa upaya simbolis

untuk menyingkirkan ide-ide yang dianggap bertentangan. beberapa sosiolog menjelaskan akar konflik secara lebih rinci. di antaranya adalah perbedaan antarindividu, baik dalam pendapat, tujuan, keinginan, maupun keyakinan mengenai objek sengketa. dalam realitas sosial, setiap individu memiliki kepribadian yang unik, dan perbedaan kepribadian ini berpotensi memunculkan konflik sosial.

selain itu, konflik sering kali dipicu oleh perbedaan kepentingan ekonomi dan politik. dalam bidang ekonomi, kegiatan usaha bebas kerap menimbulkan benturan kepentingan, seperti persaingan untuk memperebutkan wilayah pasar atau daerah pengembangan usaha. di sisi lain, konflik politik biasanya dipicu oleh partai atau kelompok yang berusaha merebut dan mempertahankan kekuasaan.

perubahan sosial yang tiba-tiba juga menjadi salah satu faktor signifikan penyebab konflik. perubahan ini sering kali menciptakan ketidakstabilan karena tatanan perilaku lama tidak lagi relevan sebagai pedoman, sementara aturan atau tatanan baru belum sepenuhnya dipahami. situasi ini dapat menimbulkan kebingungan dan menciptakan kelompok konservatif, radikal, serta moderat yang saling bertentangan.

perbedaan budaya juga menjadi salah satu sumber konflik. perbedaan ini sering kali menghasilkan persepsi yang tidak seimbang antara kelompok, terutama karena sikap etnosentrisme, yakni keyakinan bahwa budaya kelompok sendiri adalah yang paling unggul dan ideal dibandingkan dengan budaya kelompok lain.

menurut ralf dahrendorf, konflik yang terjadi dalam masyarakat tidak hanya disebabkan oleh masalah ekonomi sebagaimana yang dipahami oleh karl marx, tetapi juga melibatkan berbagai aspek sosial. konflik dalam masyarakat

terjadi karena adanya perbedaan kekuasaan diantara kelompok - kelompok sosial. ketidakseimbangan dalam hubungan - hubungan sosial menjadi pemicu utama konflik. dahrendorf menjelaskan bahwa hubungan dalam struktur sosial sangat ditentukan oleh distribusi kekuasaan. esensi kekuasaan menurut dahrendorf, sebagaimana yang dijelaskan oleh wallace dan wolf, adalah kontrol dan sanksi. hal ini memungkinkan pihak yang berkuasa untuk memberikan perintah dan memperoleh apa yang mereka inginkan dari pihak yang tidak memiliki kekuasaan.

konflik dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu konflik antarindividu, konflik antarkelompok sosial, konflik antara massa yang terorganisir dan yang tidak terorganisir, serta konflik antar satuan nasional. secara umum, ada dua dimensi konflik utama. pertama, dimensi vertikal, yaitu konflik antara elite dan massa. kedua, konflik horizontal, yang terjadi di antara massa atau di dalam masyarakat itu sendiri. selain jenis konflik, terdapat pula berbagai tipe konflik, yaitu tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka, dan konflik yang hanya terlihat di permukaan (novri susan, 2009: 92-93).

1.7 resolusi konflik

resolusi konflik merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk menangani akar penyebab konflik serta berusaha membangun hubungan- hubungan baru yang lebih kuat dan tahan lama di antara kelompok-kelompok yang sebelumnya bermusuhan. resolusi konflik mencakup berbagai strategi untuk menangani konflik yang sedang berlangsung, dengan tujuan tidak hanya mencapai kesepakatan guna mengakhiri kekerasan (penyelesaian konflik), tetapi juga menyelesaikan berbagai perbedaan mendasar yang menjadi akar penyebab konflik tersebut.

istilah "resolusi konflik" memiliki cakupan yang luas dan menunjukkan bahwa penyebab konflik yang mendalam dan telah berakar diperhatikan dan diselesaikan. hal ini juga menandakan adanya perubahan dalam struktur konflik itu sendiri. weitzman & weitzman (dalam morton & coleman, 2000: 197) mendefinisikan resolusi konflik sebagai tindakan pemecahan masalah bersama (solve a problem together). berbeda dengan pandangan tersebut, fisher et al. menyatakan bahwa resolusi konflik adalah usaha untuk menangani penyebab konflik sekaligus membangun hubungan baru yang dapat bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang bertikai. menurut mindes, resolusi konflik adalah kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan pihak lain. ia menambahkan bahwa kemampuan ini merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral, yang memerlukan keterampilan bernegosiasi, berkompromi, serta mengembangkan rasa keadilan.

holsti menjelaskan bahwa istilah resolusi konflik (conflict resolution) memiliki beragam makna sesuai dengan perspektif para ahli yang meneliti konflik. secara umum, dikenal tiga cara utama untuk menyelesaikan konflik, yaitu melalui negosiasi bilateral atau multilateral, mediasi oleh pihak ketiga, serta adjudikasi atau arbitrase yang melibatkan lembaga hukum independen. resolusi konflik melalui negosiasi merupakan metode yang paling umum digunakan, terutama di antara negara atau pihak-pihak yang terlibat konflik. jika konflik hanya melibatkan dua pihak, negosiasi dilakukan secara bilateral. namun, jika lebih dari dua pihak terlibat, negosiasi dilakukan secara multilateral.

berbeda dengan negosiasi, mediasi melibatkan pihak ketiga sebagai perantara atau mediator. mediasi ini

diperlukan karena konflik antara dua atau lebih pihak sering kali cenderung mengarah pada kekerasan dan saling menghancurkan. tindakan kekerasan ini, jika dibiarkan, dapat memperburuk hubungan antar pihak hingga komunikasi menjadi terputus. dalam situasi ini, peran mediator sangat penting untuk memulihkan komunikasi antara pihak- pihak yang bertikai.

sementara itu, resolusi konflik melalui adjudikasi atau arbitrase dilakukan ketika kedua belah pihak sepakat untuk membawa perselisihan mereka ke lembaga hukum independen. lembaga ini menitikberatkan penyelesaian pada pertimbangan hukum internasional. sama seperti negosiasi, proses adjudikasi juga menekankan pentingnya kesepakatan bersama di antara pihak-pihak yang bertikai untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum.

1.8 penelitian terdahulu

adapun beberapa penelitian yang membahas relevansi topik ini, diantaranya penelitian oleh nikita citra dewi dr. sulastriyono, s.h., m.si. dalam jurnalnya yang berjudul “konflik penguasaan lahan tanah di kecamatan wongsorejo, kabupaten banyuwangi” yang diterbitkan pada tahun 2016 menganalisis pola penguasaan tanah oleh masyarakat di desa alasbuluh dan desa wongsorejo, konflik yang dialami masyarakat dalam melaksanakan penguasaan tanah dan upaya yang dilakukan masyarakat desa alasbuluh dan desa wongsorejo untuk mengatasi konflik penguasaan tanah yang dialami. penelitian ini menggunakan teori konflik agraria, yang membahas bagaimana penguasaan tanah dapat memicu konflik antara masyarakat dan pemilik modal (perusahaan), dan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan

pendekatan empiris yuridis. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 2 (dua) penguasaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat petani kampung bongkoran atau petani anggota organisasi petani wongsorejo banyuwangi yang didasarkan penguasaan tanah hasil membuka hutan dan mengolah lahan perkebunan yang ditelantarkan, dan oleh pt. wongsoredjo yang didasarkan atas pemilikan hak yang bertahap berupa hak erfpacht, hak guna usaha sebagai hasil konversi hak erfpacht, hak guna usaha dan hak guna bangunan.

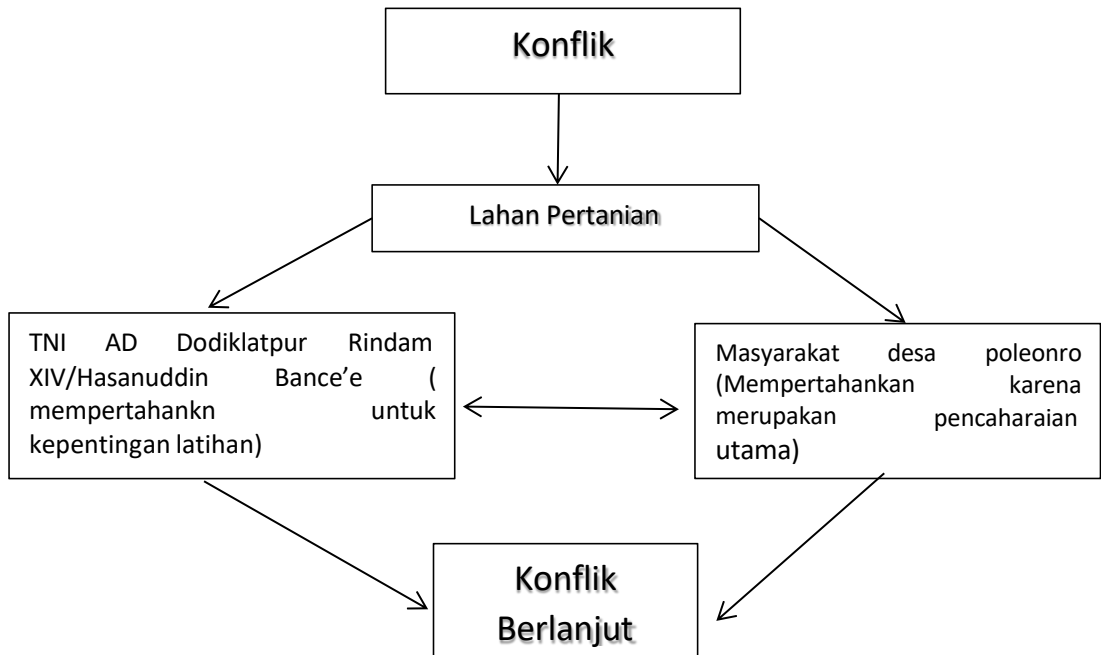
selain itu, penelitian bayu adradreide, dengan judul skripsi “konflik penguasaan tanah hgu antara pt.pn xxi dengan warga desa sekarbanyu dan tegalrejo di kecamatan sumbermanjing wetan, kabupaten malang, provinsi jawa timur” yang diterbitkan pada tahun 2009 penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

penyebab terjadinya konflik dan peran kantor pertanahan kabupaten malang dalam proses penyelesaian sengketa dan konflik tersebut. penelitian ini menggunakan teori konflik sosial dan teori ketidakadilan agraria, dan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. hasil penelitian ini menunjukkan penyebab terjadinya konflik ini dikarenakan

terakhir oleh rahma syafitri dan marisa elsera dalam artikel berjudul “konflik penguasaan lahan eks tambang pt. antam tbk. di kelurahan sungai enam, kecamatan bintan timur, kabupaten bintan. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dinamika konflik penguasaan lahan eks tambang pt antam tbk di kelurahan sungai enam kecamatan bintan timur kabupaten bintan. penelitian ini mengacu pada teori konflik agraria dan teori ketidakadilan distribusi sumber daya, yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan

studi kasus. hasil penelitian menunjukkan konflik yang terjadi masih pada fase pertentangan atas persepsi lahan eks tambang pt antam antara pemilik resmi pt antam dengan masyarakat. masyarakat flores yang saat ini menempati lahan tersebut menganggap tanah tersebut milik tuhan sehingga mereka berhak menempati lahan dan menjadikannya sebagai tempat tinggal dan bercocok tanam, anggapan ini dinilai benar karena mereka bisa hidup puluhan tahun ditanah tersebut tanpa adanya permintaan langsung dari pt. antam tbk untuk mereka pindah. sedangkan pihak pt. antam, tbk hanya bisa membuat peringatan dengan membuat pemberitahuan di salah satu sudut lahan dengan tulisan bahwa tanah tersebut milik pt antam, tbk.

1.9 kerangka berpikir



kerangka berpikir adalah landasan pemikiran yang mengombinasikan teori, hasil observasi, fakta, serta kajian pustaka yang berfungsi sebagai pijakan dalam menyusun karya tulis ilmiah. kerangka ini sering dimanfaatkan untuk membantu penulis menyelesaikan karya tulis, baik yang bersifat kreatif maupun berbasis penelitian. selain itu, kerangka berpikir dapat diwujudkan dalam bentuk visual seperti diagram yang menunjukkan hubungan antar elemen. dalam kerangka berpikir, variabel-variabel penelitian dijelaskan secara lebih rinci dan relevan dengan isu yang sedang diteliti. penelitian ini berlandaskan teori konflik dan konflik penguasaan dalam ilmu politik untuk menganalisis

konflik terkait lahan pertanian antara masyarakat dan tni ad di desa poleonro, kecamatan libureng, kabupaten bone.

konflik ini membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, baik bagi masyarakat desa poleonro maupun pihak tni. situasi tersebut menuntut adanya upaya penyelesaian yang efektif agar konflik tidak berkepanjangan dan dapat menghasilkan kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.

bab ii metode penelitian

bab ini membahas tentang tipe dan jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian dan teknis analisis data.

2.1 tipe dan jenis penelitian

dalam penelitian ini, penulis menerapkan tipe penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta secara akurat dengan dukungan argumen yang relevan. penelitian ini dirancang untuk mengumpulkan informasi sebagaimana adanya pada saat proses penelitian berlangsung. tujuan utama dari penelitian deskriptif ini adalah menggali lebih dalam penyebab konflik, dan pihak- pihak yang terlibat sehingga sampai saat ini konflik itu belum berakhir dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan secara jelas dan faktual tentang konflik lahan pertanian antara masyarakat dan tni ad di desa poleonro, kecamatan libureng, kabupaten bone. pendekatan dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. denzin & lincoln (1994) penelitian kualitatif merupakan penelitian menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada, penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

2.2 waktu dan lokasi penelitian

waktu penelitian berlangsung dari bulan desember 2024 hingga mei 2025. tahap penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yakni tahap pra penelitian dan persiapan penelitian yang meliputi pengumpulan data awal dan penyusunan proposal penelitian dan tahap pengumpulan data dengan mewawancarai informan untuk memperoleh informasi dan mengelola data penelitian, penelitian ini dilakukan desa poleonro, kecamatan libureng, kabupaten bone yang dilakukan di dua dusun, meliputi dusun kaluppang dan dusun bance'e. lokasi ini dipilih karena menjadi wilayah yang terkait dalam konflik.

2.3 jenis dan sumber data

dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang di gunakan sebagai berikut

2.3.1 data primer

sumber data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara menggali sumber asli secara langsung melalui informan. perolehan data juga didapat peneliti melalui pengamatan langsung di lapangan sehingga peneliti juga dapat memperkuat data-data yang diperoleh dari responden dengan apa yang diamatinya secara langsung. sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat desa poleonro yang terlibat konflik dan kepala desa poleonro. sebagian besar data yang diperoleh dari para informan memang hanya berasal dari masyarakat, karena pada saat penelitian berlangsung peneliti mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses langsung kepada pihak tni. kondisi tersebut disebabkan oleh keadaan sosial dan situasi lapangan yang membuat peneliti tidak dapat melakukan wawancara dengan pihak

militer. dengan demikian, perspektif yang paling dominan dalam penelitian ini adalah dari masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung, sementara keterbatasan akses terhadap tni menjadi salah satu kendala yang berada di luar kendali peneliti.

2.3.2 data sekunder

data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, literatur- literatur, serta informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. terdapat pula situs situs yang diakses untuk memperoleh data yang lebih akurat. dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder berupa jurnal, serta website yang penulis anggap relevan dengan konflik penguasaan lahan. data sekunder ditujukan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

2.4 informan penelitian

informan penelitian menurut moleong (2010) informan penelitian merupakan seseorang yang benar-benar mengetahui sesuatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya. penelitian ini akan menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara mendalam bersama para informan guna mengetahui, menjelaskan serta mendeskripsikan mengenai konflik lahan pertanian antara masyarakat dan tentara nasional indonesia (tni ad) di desa poleonro, kecamatan libureng kabupaten bone. berikut beberapa informan penelitian yang menjadi sumber data:

1. sultan (kepala desa poleonro)
2. sudarmin (kepala dusun bance'e)
3. yakib (masyarakat yang terdampak) 4,

anto (masyarakat
yang terdampak)

5. sinar (masyarakat yang tidak terdampak)

6. evi sasmita (masyarakat yang tidak terdampak)

2.5 teknik pengumpulan data

teknik pengumpulan data merupakan tahapan strategis dalam penelitian karena bertujuan untuk memperoleh data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan penelitian ini menggunakan sumber data lisan dan tertulis, dan teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

2.5.1 observasi

menurut banister (poerwandari 2001), istilah observasi berasal dari bahasa latin yang berarti melihat dan memperhatikan. secara luas banister menjelaskan bahwa observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. peneliti mencatat informasi secara sistematis terkait dengan apa yang disaksikan selama penelitian, khususnya mengenai konflik perebutan lahan antara masyarakat dan tni. pencatatan ini berbentuk catatan lapangan, yaitu catatan tertulis mengenai apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan selama pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif (lexy j. moleong, 2010: 144). observasi dalam penelitian ini dilakukan di lokasi konflik lahan di desa poleonro, kabupaten bone.

2.5.2 wawancara

wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu antara dua pihak, pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban (lexy j. moleong, 2010: 186). menurut (koentjaraningrat,1993) wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi yang relevan. dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana pedoman wawancara disiapkan untuk memandu percakapan sesuai dengan masalah yang akan dibahas. informan dalam penelitian ini adalah kepala desa poleonro, masyarakat dusun bance'e, dan dusun kaluppang yang terkena dampak, dan tni ad dodiklatpur rindam xiv/hasanuddin bance'e.

2.4.3 dokumentasi

dokumentasi merupakan cara pengumpulan data berupa dokumen- dokumen tertulis maupun gambar atau foto ketika melakukan wawancara dengan informan. dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa gambar pada saat melakukan wawancara, terdapat pula dokumen berupa rekaman suara antara penulis dengan informan.

2.6 teknik analisis data

2.6.1 reduksi data (data reduction)

data yang dikumpulkan dari lapangan dicatat dalam bentuk laporan atau uraian terperinci, kemudian disederhanakan dan difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan fokus penelitian. data tersebut dikelompokkan dan dikategorikan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu konflik penggunaan lahan antara masyarakat dan tni di desa

poleonro. karena data yang diperoleh dari lapangan sangat banyak, diperlukan proses seleksi dan perincian agar sesuai dengan fokus penelitian. dalam tahap ini, peneliti melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, serta menggolongkan data untuk memperjelas, memfokuskan, dan menghilangkan informasi yang tidak relevan. proses reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus sepanjang penelitian kualitatif berlangsung dan menjadi bagian integral dari analisis data (miles dan huberman, 2009: 16).

2.6.2 penyajian data (data display)

penyajian data adalah proses menyusun informasi secara sistematis untuk memberikan gambaran yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. informasi yang disajikan dapat berupa matriks, skema, tabel, atau jaringan kerja yang berkaitan dengan penelitian. melalui penyajian data, peneliti dapat memahami situasi yang sedang diteliti, mengidentifikasi pola-pola tertentu, dan menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam analisis data maupun tahapan penelitian lainnya (miles dan huberman, 2009: 17).

2.6.3 penarikan kesimpulan

dalam penelitian ini, teori konflik digunakan untuk menganalisis dinamika konflik tersebut. konflik bermula dari keinginan masyarakat untuk mempertahankan hak atas tanah yang mereka miliki, sementara tni mengklaim tanah tersebut sebagai milik mereka. konflik ini menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat desa poleonro, termasuk penutupan akses jalan menuju lahan pertanian, perusakan kandang ternak, serta penebangan pohon-pohon yang ditanam warga seperti kakao, jati, pisang, dan tanaman

lainnya, yang semuanya dihancurkan oleh tni ad (dodiklatpur rindam xiv/hasanuddin bance'e).

upaya penyelesaian konflik telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pihak-pihak terkait lainnya. namun, sejauh ini, upaya tersebut hanya terbatas pada dialog tanpa menghasilkan solusi yang memuaskan. kedua belah pihak tetap bersikeras mempertahankan klaim masing-masing terhadap tanah yang menjadi sengketa. pemerintah belum menunjukkan tanggung jawab yang jelas dalam menyelesaikan masalah ini. penyelesaian konflik ini memerlukan keterlibatan pihak ketiga yang netral, bijaksana, dan tegas, seperti yang dijelaskan oleh soerjono soekanto. menurut soekanto, pihak ketiga dapat mengambil langkah-langkah seperti arbitrase (arbitration), yaitu mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak, serta mediasi (mediation), di mana mediator membantu mengumpulkan fakta, menjalin kembali komunikasi yang terputus, menjernihkan masalah, dan mencari solusi terpadu yang dapat diterima oleh semua pihak.

namun, hingga saat ini, belum ada penyelesaian yang memuaskan dari pemerintah terkait konflik ini. tni ad (dodiklatpur rindam xiv/hasanuddin bance'e) masih melakukan tindakan-tindakan seperti perusakan lahan dan kandang ternak milik masyarakat desa poleonro, kabupaten bone